



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SURAT PENGHENTIAN
PENYIDIKAN (SP3) DALAM PERKARA
TIDAK PIDANA KORUPSI
Studi Kasus 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.**

TESIS

**FRITS GERALD KAYUKATUI
1520922055**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2018**



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SURAT PENGHENTIAN
PENYIDIKAN (SP3) DALAM PERKARA
TIDAK PIDANA KORUPSI
Studi Kasus 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

**FRITS GERALD KAYUKATUI
1520922055**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2018**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah benar hasil karya sendiri, bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenar- benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Nama : Frits Gerald Kayukatui
NRP : 1520922055
Tanggal : 25 Januari 2018

Jakarta, 25 Januari 2018

Yang Menyatakan,



Frits Gerald Kayukatui

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Frits Gerald Kayukatui
NRP : 1520922055
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non Eksklusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SURAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DALAM PERKARA TIDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.)**

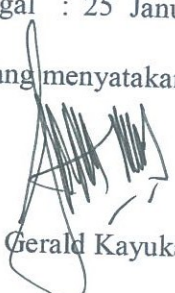
Beserta perangkat yang ada. Dengan hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berhak menyimpan dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Januari 2018

Yang menyatakan


Frits Gerald Kayukatui

...

PENGESAHAN

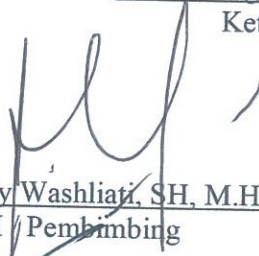
Tesis yang diajukan oleh :

Nama : Frits Gerald Kayukatui
NRP : 1520922055
Program Studi : Magister Hukum
Judul Tesis : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SURAT
PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DALAM
PERKARA TIDAK PIDANA KORUPSI
Studi Kasus 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.



Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N
Ketua Penguji



Dr. Dra Hj. Laily Washliati, SH, M.Hum
Penguji I / Pembimbing



Dr. Moh. Hatt, SH, M. Kn
Penguji II / Pembimbing



Dr. Desi Payer Tarina, S.H., M.H.
Dekan



Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N
Ka. Prodi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 25 Januari 2018

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SURAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DALAM PERKARA TIDAK

FRITS GERALD KAYUKATUI

ABSTRAK

Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau yang sering disingkat SP3 selalu menjadi bahan tuduhan dari masyarakat bahwa penegak hukum tidak serius dalam menyelesaikan berbagai kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di negara ini. Di mata masyarakat yang menghendaki agar pelaku tindak pidana korupsi diproses secara hukum dan dikenai hukuman yang seadil-adilnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah proses di keluarkannya surat penghentian penyidikan (SP3) dalam perkara tindak pidana korupsi? 2. Bagaimanakah terhadap putusan hakim yang memerintahkan untuk penghentian penyidikan? Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk menganalisis proses di keluarkannya surat penghentian penyidikan (SP3) dalam perkara tindak pidana korupsi. 2. Untuk menganalisis terhadap putusan hakim yang memerintahkan untuk penghentian penyidikan. Teori yang digunakan adalah teori penegakkan hukum dan teori kewenangan, dengan metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan studi kasus diketahui bahwa 1. Proses di keluarkannya surat penghentian penyidikan (SP3) dalam perkara tindak pidana korupsi dimulai pada saat dilakukan proses penyelidikan oleh penyidik pada suatu perkara tindak pidana yang terjadi. Dalam Pasal 1 angka (2 dan 5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan pengertian tentang penyidikan dan penyelidikan. Penyidikan tindak pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 2. Putusan hakim yang memerintahkan untuk penghentian penyidikan dapat dilakukan dengan pengajuan permohonan praperadilan. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dapat diajukan sebagai objek gugat-praperadilan ke pengadilan, dimana pihak lembaga penyidik (dalam hal ini Kepolisian bila dihentikan ketika masih dalam tahap penyidikan/penyelidikan, ataupun Kejaksaan bila dihentikan saat memasuki tahap penuntutan) dijadikan sebagai pihak Termohon Preperadilan, dengan tujuan agar hakim menyatakan bahwa SP3 tidak sah, dan sekaligus memerintahkan agar pihak penyidik meneruskan proses penyidikan.

**JURIDICAL REVIEW ON LETTER OF TERMINATION OF
INVESTIGATION (SP3) IN CASE OF NON-CRIMINAL
CORRUPTION**

FRITS GERALD KAYUKATUI

ABSTRACT

Investigation is the most important stage in the criminal procedural law framework in Indonesia, because in this stage the investigator seeks to disclose the facts and evidence of a crime and find the suspect of the perpetrator of the crime. The issuance of a Termination of Investigation Letter or frequently abbreviated as SP3 has always been a matter of accusation from the public that law enforcement is not serious in solving various cases of corruption in the country. In the eyes of the people who wish that the perpetrators of corruption are prosecuted and punished as fairly as possible. The problems in this research are 1. How is the process of issuing letter of termination of investigation (SP3) in corruption crime case? 2. What about the decision of the judge ordering to terminate the investigation? The purpose of this study is 1. To analyze the process in issuing a letter of discontinuation of investigation (SP3) in the case of corruption. 2. To analyze the decision of the judge ordering to terminate the investigation. The theory used is the theory of law enforcement and authority theory, with the method of normative juridical research with case study approach known that 1. The process of issuing the letter of discontinuation of investigation (SP3) in corruption crime cases started at the time of investigation by the investigator on a case of action the criminal happens. In Article 1 number (2 and 5) of Law Number 8 Year 1981 regarding Criminal Procedure Code mentioned the definition of investigation and investigation. The investigation of a crime constitutes a series of investigative actions in respect of and in the manner prescribed by law to seek and collect evidence, which with such evidence makes light of the criminal offense and to find the suspect. 2. The judge's decision ordering for the suspension of an investigation may be made with a pre-trial petition. The Termination of Investigation Orders (SP3) may be filed as a pretrial object to the court, where the investigating agency (in this case the Police if terminated during investigation or prosecutor's office if terminated upon entering the prosecution stage) is designated as the Respondent's side , with the aim that the judge shall declare that the SP3 is invalid, and at the same time order the investigator to proceed with the investigation process.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis, untuk itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran untuk memperbaiki, menyempurnakan tesis yang berjudul :

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SURAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DALAM PERKARA TIDAK PIDANA KORUPSI”

Studi Kasus 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dengan ketulusan hati kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini dengan memberikan bantuan moril dan dorongan semangat. kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Eddy S. Siradj. MSc., Eng selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran “ Jakarta.
3. Ibu DR. Erni Agustina, SH, Sp.N, selaku Ketua Program Pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Dr.Dra. Hj. Laily Washliati, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I.
5. Dr. Moh. Hatt, SH, M. Kn, selaku Pembimbing II.
6. Dosen Penguji, Para Dosen, Para Staf dan seluruh Pihak yang telah membantu sejak awal perkuliahan sampai dengan perbaikan Tesis.
7. Seluruh rekan-rekan penulis baik di Teman – teman di Kejaksaan maupun di kampus Universitas Pembangunan Nasional- UPN "Veteran" Jakarta.
8. Seluruh rekan-rekan Advokat, Polisi, Jaksa dan pihak-pihak yang tidak bias saya sebutkan satu persatu.
9. Yang terutama penulis ucapkan terima kasih yang mendalam pada keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat, doa serta perhatian.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi yang membaca pada umumnya.

Jakarta, 25 Januari 2018

Frits Gerald Kayukatui

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Perumusan Masalah.....	5
I.3. Tujuan Penelitian.....	5
I.4. Manfaat Penelitian.....	6
I.5. Kerangka Teoritis dan Konseptual	6
I.5.1. Kerangka Teoritis	6
I.5.2. Kerangka Konseptual	10
I.6. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
II.1. Korupsi	12
II.1.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	12
II.1.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	15
II.1.3. Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime.....	20
II.2. Komisi Pemberantasan Korupsi	23
II.2.1. Sejarah singkat berdirinya KPK.....	23
II.2.2. Tugas dan Wewenang KPK	25
II.2.3. Kewenangan KPK dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi... ..	28
II.2.4. Kewenangan Melakukan Penyidikan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	31
II.3. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)	4

II.4.Kewenangan Penyidik Mengeluarkan SP3 Pada Perkara	
Tindak Pidana Korupsi	47
II.4.1. Penyidik POLRI dan Kejaksaan.....	47
II.4.2. Penyidik KPK.....	49
II.4.3. Alasan-alasan Pemberian SP3	51
II.5.Putusan Pengadilan	53
BAB III. METODE PENELITIAN	57
III.1. Tipe Penelitian	57
III.2. Sifat Penelitian	58
III.3. Sumber Data.....	58
III.4.Metode Pengumpul Data.....	59
III.5. Metode Analisis data.....	60
BAB IV. PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DALAM PERKARA	
TIDAK PIDANA KORUPSI	62
IV.1.Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi ...	62
IV.2.Putusan Hakim Yang Memerintahkan Untuk Penghentian Penyidikan	73
IV.2.1. Duduk Perkara	73
IV.2.2. Petitum.....	102
IV.2.3. Eksepsi.....	105
IV.2.4. Tentang Hukumnya	118
IV.2.5. Putusan Hakim.....	132
IV.2.6. Pembahasan	132
BAB V. PENUTUP	135
V.1. Kesimpulan	135
V.2.Saran	136

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP